



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PDI PERJUANGAN**



Sekretariat: Jl. Malioboro, Nomor 54, Yogyakarta
Telpun/Fax: (0274) 560293, 512688. Ext 2410

**PEMANDAGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

Yth. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
Ykh. Sekretaris Daerah Dan Seluruh Jajaran Eksekutif,
Yth. Seluruh Anggota Dewan, Rekan-Rekan Pers dan Hadirin Yang
kami Muliakan.

Assalamu' Allaikum. Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Om Swasti astu,
Namo Buddaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

MERDEKA !

Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun.

Rapat Paripurna Dewan Yang kami Hormati,
Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih dan rasa hormat setinggi tingginya kepada :

1. Pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah ini.
2. Saudara Gubernur yang telah berkenan untuk memberi penjelasan terhadap rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan sangat berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektifitas, keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas. Secara Ekonomi berarti anggaran tersebut akan selalu meningkat jumlahnya; Efisien berarti alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan; Efektif berarti alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan; Adil berarti alokasi dan hasilnya sesuai dengan nilai keadilan; Responsif berarti proses penganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat. Disisi lain belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Oleh sebab itu kualitas belanja menunjukkan bahwa belanja daerah dapat dicapai jika prioritas belanja dilakukan secara tepat waktu dan tepat alokasi. Prioritas belanja juga harus mendapat dukungan para pemangku kepentingan di daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara akuntabel, dari hal tersebut maka diharapkan belanja daerah akan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022. Pada tahun 2020 ini RKPD DIY mengusung tema pembangunan **"Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas."**

Kondisi ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan masih merupakan isu tematik yang penting di DIY,

sehingga tema RKPD yang berfokus pada pemerataan pembangunan menjadi upaya utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara umum Nota Keuangan Rancangan APBD DIY Tahun Anggaran 2020 berisi tentang:

1. Rencana Anggaran Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah, dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah;
3. Pembiayaan, diarahkan pada peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah yang berorientasi kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,

Issue-issue strategis yang menjadi perhatian pokok adalah :

1. Kemiskinan.
Kemiskinan merupakan permasalahan daerah dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat miskin, diperlukan langkahlangkah strategis dan komprehensif.
2. Ketimpangan wilayah /ketimpangan Pendapatan.
Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pembiayaan Pembangunan.
Pola pembiayaan pembangunan pemerintah daerah masih mengandalkan anggaran yang bersumber dari dana konvensional seperti pajak dan retribusi. Pemerintah daerah

masih mengandalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mengatasi keterbatasan dana pembangunan. Untuk itu, peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skema skema Corporate Social Responsibility (CSR)

Menyimak nota keuangan APBD DIY 2020 kita lihat bahwa Landasan APBD 2020 disusun berangkat dari asumsi proyeksi kondisi ekonomi makro DIY dimana asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,99%, inflasi 2,21%, pengangguran terbuka diharapkan terjadi penurunan menjadi 3,33% yang pada tahun sebesar 3,34%, kemiskinan ditargetkan menjadi 10,71%, ketimpangan antar wilayah menjadi 0,4671 serta proyeksi ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.441.

Berdasarkan asumsi tersebut diatas maka sinergitas program dan kegiatan terhadap capaian target haruslah secara terukur, terhadap capaian penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, maupun ketimpangan wilayah maupun ketimpangan pendapatan dapat berkurang. Terkhusus ketimpangan ini, harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ke depan disebabkan ketimpangan ini masih jauh dibawah target RPJMD sebesar 0,3776.

Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,

Pada forum terhormat ini perkenankan Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan akan beberapa hal :

1. Dalam penjelasan Gubernur terdapat pernyataan terkait kebutuhan mendesak bahwa ada beberapa kegiatan yang mendesak, antara lain: penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON); Perencanaan pembangunan sirkuit Gading di Gunungkidul, dan Kekurangan untuk pegawai Non PNS serta penyesuaian kelompok belanja. Sedangkan dalam catatan, Visi RPJMD 2017 – 2022 adalah “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Untuk itu, kami belum melihat adanya kemendesakan pembangunan sirkuit di Gading Gunung Kidul. Kami memohon penjelasan lebih lanjut tentang itu atau ditinjau kembali sebagai kebijakan prioritas dalam tahun 2020.

2. Upaya kajian – kajian yang implementatif perlu mendapat porsi yang lebih memadai berkait dengan upaya pengurangan kemiskinan supaya ke depan program yang mengarah kepada program pengurangan kemiskinan di DIY bisa berjalan lebih terarah dan tepat sasaran untuk mencapai target RPJMD dimana angka kemiskinan di DIY bisa turun sampai 7 prosen.
3. Penganggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam upaya mendorong pertumbuhan yang berkualitas harus benar – benar terimplementasi secara terukur dalam penganggaran.

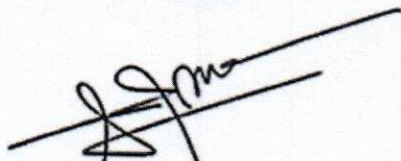
Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, ada kurang dan lebihnya mohon maaf serta terimakasih atas perhatiannya.

Yogyakarta , 4 November 2019

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY

Ketua



RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd., M.Si Wahyu Pradana Ade Saputra, S.Psi

Sekretaris

